



LAPORAN

Internalisasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum






**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (LP2AI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN



LAPORAN INTERNALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM KURIKULUM

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh:
LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
		
Dr. Nasrun, M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rahim Nanda, MT. I.PM.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	24.A/LP2AI/III/44/23	No. Revisi	: 1
Tanggal Terbit	21 Maret 2023	Halaman	: 1- 17

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa adalah ucapan yang seharusnya kami hanturkan kepada-nya, karena berkat pengasih-nya dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi tauladan kita.

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai pusat pendidikan yang memiliki peran tak tergantikan dalam membentuk karakter dan etos kerja generasi masa depan. Seiring perkembangan Zaman yang selalu berubah-ubah, maka salah satu hal yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar salah satu prioritas utama pemberantasan korupsi dalam menjaga integritas dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Laporan ini merangkum perjalanan dan implementasi internalisasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar, sebuah langkah progresif yang diambil untuk menanamkan nilai-nilai etika, kejujuran, dan integritas kepada generasi penerus kita melalui proses pendidikan.

Penyusunan laporan ini dilakukan dengan tujuan untuk memaparkan secara komprehensif proses, tantangan, serta manfaat yang diperoleh dari integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Melalui upaya kolaboratif dan komitmen bersama, kami berharap bahwa langkah ini menjadi tonggak awal untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas, di mana setiap insan pendidikan dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, serta dedikasi dalam mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi. Semoga laporan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua pihak untuk terus berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih bermartabat dan bersih dari korupsi.

Makassar, 20 Maret 2023

Ketua LP2AI

Dr. Nasrun, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Manfaat	3
BAB II METODE	4
A. Lokasi Kegiatan	4
B. Waktu Pelaksanaan	4
C. Instrument	4
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	10
A. Analisis	10
B. Pembahasan.....	13
BAB IV PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Rekomendasi.....	16
LAMPIRAN.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Fakultas dan Program Studi	10
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Analisis Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum	12
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi beragam tantangan. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi musuh nyata bagi para koruptor sehingga berbagai cara dilakukan untuk melemahkan lembaga ini. Upaya-upaya yang dilakukan secara politis menggunakan beragam jalan untuk melemahkan kinerja KPK. Selain upaya dari luar, persoalan internal KPK juga memunculkan kekhawatiran tentang optimalisasi kinerja lembaga ini. Muncul kekhawatiran persoalan-persoalan internal tersebut akan mengganggu kinerja KPK sehingga lembaga ini tidak mampu bekerja maksimal. Semenjak dibentuk pada tahun 2003 lalu, KPK selalu berhadapan dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan untuk melemahkan lembaga ini. Di sisi lain kasus korupsi kian hari kian marak. Setiap hari muncul berita penangkapan para pejabat korupsi di berbagai daerah. Pesimisme pemberantasan korupsi di Indonesia memunculkan sebuah pertanyaan, akankah korupsi di Indonesia mampu dihapus? Atau justru semakin marak dengan dilemahkannya lembaga antikorupsi.

Upaya pemberantasan korupsi meliputi dua aspek besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Salah satu upaya berkelanjutan untuk mencegah korupsi adalah terinternalisasinya sikap antikorupsi dalam diri setiap elemen bangsa ini. Sikap itulah yang akan mampu menjadi benteng dari godaan korupsi. Salah satu elemen penting bangsa adalah generasi mudanya. Mereka kelak akan menjadi pemimpin yang meneruskan tongkat estafet bangsa. Jika sikap antikorupsi tidak tertanam kuat dalam jiwa mereka maka upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia. Para pemimpin bangsa ini kelak akan memunculkan perilaku korup yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu,

internalisasi sikap antikorupsi di kalangan generasi penerus bangsa adalah persoalan penting yang harus mendapat perhatian serius.

Pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi merupakan langkah krusial dalam menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas kepada generasi akademisi masa depan. Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter masyarakat memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Di bagian ini, dipaparkan landasan dan alasan mengapa pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam kurikulum, serta peran penting yang dimainkan oleh perguruan tinggi dalam upaya pencegahan korupsi.

B. Tujuan

Tujuan internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

1. Membentuk kesadaran yang kuat terhadap bahaya dan dampak negatif korupsi di antara mahasiswa dan tenaga pendidik.
2. Pembentukan karakter yang kuat dan sikap yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan moral.
3. Mengembangkan keterampilan praktis dalam pencegahan korupsi
4. Diharapkan mahasiswa dan tenaga pendidik akan tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi
5. Menciptakan pemimpin masa depan, baik di bidang bisnis, pemerintahan, maupun sosial, yang memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi

6. Memperkuat reputasi dan kredibilitas institusi pendidikan dengan menunjukkan komitmen mereka dalam mendidik individu yang berintegritas tinggi.

C. Manfaat

Manfaat internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

1. Peningkatan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif korupsi di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik
2. Mahasiswa dan tenaga pendidik dilatih untuk mengutamakan prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan transparansi dalam tindakan mereka, baik dalam lingkungan akademik maupun di luar kampus
3. Mengembangkan keterampilan praktis dalam pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab
4. Mahasiswa dan tenaga pendidik diberdayakan untuk memahami peran mereka sebagai agen perubahan sosial
5. Menghasilkan individu yang lebih siap menjadi pemimpin di berbagai bidang dengan integritas yang kuat
6. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB II METODE

A. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan penyusunan kurikulum dalam rangka internalisasi Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan Oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, maka universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal ini Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) melaksanakan workshop penyusunan kurikulum.

B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dengan melibatkan Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan *Stakeholder* Eksternal pada Tahun 2023.

C. Instrumen

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum. Kebijakan pengembangan kurikulum memberi arahan yang jelas tentang pengembangan kurikulum, yang secara umum terdapat 3 (tiga) hal penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu: Evaluasi kurikulum lama, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum.

Penyusunan kurikulum dan perancangan pembelajaran hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing- masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai

dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Berbagai tahapan yang harus diikuti prodi dalam melakukan internalisasi Pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum.

1. Evaluasi Kurikulum

Kurikulum merupakan ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tentang evaluasi kurikulum menjadi pedoman pembelajaran di institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, diantaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik internal maupun eksternal. Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik di ranah pengetahuan (cognitive), keterampilan (psikomotor) maupun sikap (affective).

2. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan prinsip-prinsip:

a. Prinsip Pengembangan Kurikulum

- 1) Relevansi. Kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
- 2) Kontinuitas. Kurikulum D III, S1, S2, dan S3 harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang jelas.

- 3) Fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
- 4) Efektivitas dan efisiensi. Kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah ditetapkan.
- 5) Pragmatis. Kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi sesuai dengan Panduan Implementasi Kurikulum 2019.

b. Pengembangan Kurikulum Pendekatan OBE

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

c. Konsep Pengembangan Kurikulum

- 1) Kurikulum dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi asal mahasiswa
- 2) Model kurikulum dikembangkan berdasarkan jenjang
- 3) Penciri prodi dan program unggulan
- 4) Pilihan model semester
- 5) Output pengembangan kurikulum
 - a) Identitas program studi

- b) Evaluasi kurikulum dan tracer study
- c) Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum
- d) Rumusan standar kompetensi lulusan
- e) Penetapan bahan kajian
- f) Pembentukan mata kuliah (MK) dan penentuan bobot sks
- g) Matrik distribusi mata kuliah (MK)
- h) Rencana pembelajaran semester (RPS)
- i) Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

d. Tahapan Pengembangan Kurikulum

- 1) Evaluasi kurikulum sebelumnya
- 2) Penetapan profil lulusan
- 3) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- 4) Bahan kajian
- 5) Pembentukan mata kuliah
- 6) Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum
- 7) Daftar sebaran mata kuliah tiap semester
- 8) Rencana pembelajaran semester
- 9) Mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian pembelajaran
- 10) Implementasi Hak Belajar mahasiswa
- 11) Pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

3. Pelaksanaan Kurikulum: Pembelajaran merupakan proses yang kompleks. Proses pembelajaran memerlukan pemikiran yang matang dan rasional, sehingga dibutuhkan

suatu perencanaan pembelajaran agar dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran.

a. Perencanaan: Merumuskan CPMK dan Sub CPMK

b. Proses Pembelajaran:

- 1) Standar proses pembelajaran: Karakteristik proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran.
- 2) Pembelajaran di dalam program studi: bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran, pembelajaran teori, praktikum, *blended learning*.
- 3) Pembelajaran diluar program studi: pertukaran pelajar, magang/ praktik kerja, asistensi mengajar disatuan Pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/ proyek independent, dan KKNN

c. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran berdasarkan:

- 1) Prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan
- 2) Teknik penilaian: observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket,
- 3) Instrumen penilaian: rubrik, portofolio dan karya desain.

d. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian dengan alur menyusun, menyampaikan, menyepakati, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mendokumentasikan.

e. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir

f. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: dosen atau tim pengampu

g. Pelaporan Penilaian

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
- 2) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

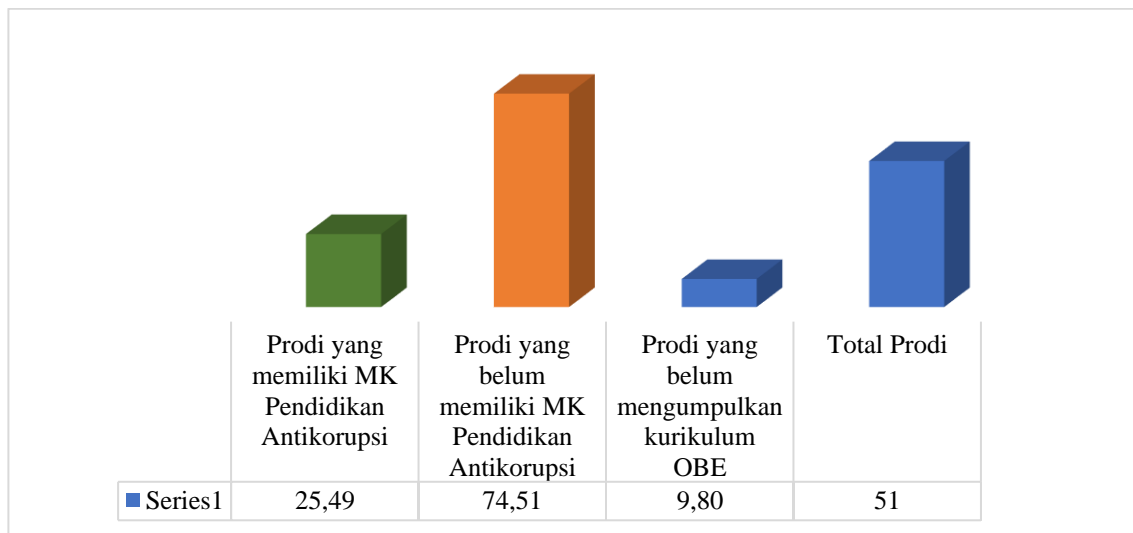
Universitas Muhammadiyah telah memiliki 8 Fakultas, 1 Pascasarjana dan 51 Program Studi pada tahun 2022/2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Fakultas dan Program Studi

No	Fakultas	Program Studi	Internalisasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam Kurikulum	
			Ya	Tidak
1	Agama Islam	S1 Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam		√
2		S1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)		√
3		S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)		√
4		S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam		√
5		S1 Pendidikan Agama Islam		√
6		S1 Pendidikan Bahasa Arab		√
7	Pertanian	S1 Agribisnis		√
8		S1 Agroteknologi		√
9		S1 Budidaya Perairan	√	
10		S1 Kehutanan		√
11	Ekonomi dan Bisnis	S1 Akuntansi		√
12		D3 Perpajakan		√
13		S1 Ekonomi Islam		√
14		S1 Ekonomi Pembangunan		√
15		S1 Manajemen		√
16	Ilmu Sosial dan	S1 Ilmu Administrasi Negara	√	
17	Ilmu Politik	S1 Ilmu Pemerintahan	√	

No	Fakultas	Program Studi	Internalisasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam Kurikulum	
			Ya	Tidak
18		S1 Ilmu Komunikasi	√	
19	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	S1 Pendidikan Dokter		√
20		Profesi Dokter		√
21		D III Keperawatan	√	
22		D III Kebidanan	√	
23		S1 Farmasi		√
24		Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√
25	S1 Pendidikan Bahasa Inggris			√
26	S1 Pendidikan Biologi		√	
27	S1 Pendidikan Fisika		√	
28	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini			√
29	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		√	
30	S1 Pendidikan Matematika			√
31	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		√	
32	S1 Pendidikan Seni Rupa			√
33	S1 Pendidikan Sosiologi		√	
34	S1 Teknologi Pendidikan			√
35	Program Profesi Guru			√
36	Teknik	Arsitektur		√
37		Teknik Informatika		√
38		Perencanaan Wilayah dan Kota		√
39		Teknik Elektro		√
40		Teknik Pengairan		√
41	Pascasarjana	S2 Agribisnis		√

No	Fakultas	Program Studi	Internalisasi Pendidikan Antikorupsi ke dalam Kurikulum	
			Ya	Tidak
42		S2 Ilmu Administrasi Publik	√	
43		S2 Manajemen		√
44		S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		√
45		S2 Pendidikan Bahasa Inggris		√
46		S2 Pendidikan Dasar		√
47		S2 Pendidikan Islam		√
48		S2 Pendidikan Sosiologi		√
49		S3 Pendidikan Agama Islam		√
50		S3 Pendidikan		√
51		Hukum	S1 Hukum Bisnis	
Total			13	38



Gambar 3. 1 Analisis Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum

Grafik diatas menunjukkan bahwa prodi yang memiliki mata kuliah Pendidikan Antikorupsi 25,49%. Maka dari itu direkomendasikan untuk semua prodi yang belum menerapkan mata kuliah Pendidikan antikorupsi menginternalisasikan kedalam kurikulum.

B. Pembahasan

Berdasarkan data bahwa 25,49% telah menerapkan **pembelajaran tentang antikorupsi**, namun prodi yang belum menerapkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, dapat dilihat dalam **pembelajaran Pancasila dan Al Islam kemuhammadiyah (AIK)** dari Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai upaya **penguatan Integritas**. Penguatan integritas merupakan upaya yang dianggap ampuh untuk memerangi perilaku tindak korupsi. Dengan kata lain, perilaku dan sikap Antikorupsi mencakup semua tindakan melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Agar memiliki integritas, setiap orang perlu dibekali dengan informasi, peningkatan kontrol diri untuk mencegah niat dan membangun sistem yang memperkecil kesempatan orang melakukan tindak korupsi, termasuk penindakan terhadap pelaku melalui penegakan hukum yang maha adil.

Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Korupsi dapat dicegah apabila masing-masing kita mampu membersihkan diri dari niat untuk melakukan korupsi, menahan godaan ketika ada kesempatan, jujur dalam berkata dan berbuat, berani menolak pemberian yang terkait dengan jabatan, berani melaporkan adanya tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi dan sebagainya. Semua itu merupakan ciri-ciri perilaku atau sikap yang ber-integritas.

Integritas, yaitu kesatuan/keselarasan/keterpaduan/kesamaan antara pikiran, ucapan, tindakan, dan hati nurani. Menurut hasil FGD Pra Konvensi Integritas yang dilakukan oleh KPK dengan K/L, integritas dapat diformulasikan $INTEGRITAS = AKSI - Korupsi$ (Integritas = (AKSI) - Korupsi), AKSI adalah singkatan dari akuntabilitas, kompetensi, sistem, dan interaksi. Keterkaitan antara integritas dengan perilaku/tindakan korupsi adalah ketika

integritas menaik, maka korupsi akan menurun, dan sebaliknya, ketika integritas menurun, maka perilaku korupsi akan menaik.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dengan kata lain, pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang memberikan penekanan pada 9 nilai antikorupsi yang dikembangkan oleh KPK, yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Sebagaimana halnya dengan pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Untuk itu, Pendidikan antikorupsi harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik (*loving good*) atau moral feeling dan perilaku yang baik (*moral action*), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Pendidikan antikorupsi dilakukan secara holistik dan menyeluruh melalui proses pembelajaran di kelas dan luar kelas, kegiatan keseharian peserta didik dan kegiatan belajar, integrasi ke dalam mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Penginternalisasian nilai-nilai dapat diawali dengan penegakan disiplin berdasarkan aturan, kode etik, dan tata tertib mahasiswa secara konsisten kepada semua warga sekolah. Dengan kata lain, penegakan disiplin tidak hanya berlaku ketat bagi peserta didik, tetapi juga bagi unsur pimpinan, manajemen, dan dosen dan tenaga kependidikan lainnya sebagai suri teladan bagi peserta didik.

Universitas Muhammadiyah Makassar terdapat beberapa prodi yang mengusulkan Mata kuliah Pendidikan Antikorupsi, selain itu prodi juga menyusun mata kuliah Pancasila, agama

dan Al Islam Kemuhammadiyah sebagai wujud dalam pencegahan korupsi pada peserta didik yang jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli. Selain dalam pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan pengembangan karakter mahasiswa melalui Darul Arqam Dasar (DAD), Darul Arqam Madya (DAM), pengajian rutin untuk membentuk integritas calon pemimpin masa depan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi adalah langkah positif yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang berintegritas. Dengan melibatkan seluruh elemen perguruan tinggi, kami percaya bahwa upaya ini akan terus memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk karakter serta mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas dan beretika.

B. Rekomendasi

Rekomendasi internalisasi Pendidikan antikorupsi dalam kurikulum di universitas Muhammadiyah Makassar:

1. Integrasi Pendidikan antikorupsi dalam kurikulum secara menyeluruh
2. Melaksanakan pembelajaran berbasis interaktif dan kreatif untuk meningkatkan pemahaman korupsi
3. Melibatkan praktisi dan tenaga ahli sebagai sumber pembelajaran korupsi di lingkungan civitas akademika
4. Penggunaan media online dan media digital sebagai sumber informasi tentang Pendidikan anti korupsi
5. Evaluasi berkelanjutan proses implementasi Pendidikan antikorupsi dalam kurikulum
6. Universitas Muhammadiyah memberikan *reward* dan *punishment*

LAMPIRAN



Gambar 1. Laporan Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Kedalam Kurikulum



Gambar 2. Laporan Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Kedalam Kurikulum



Gambar 3. Laporan Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Kedalam Kurikulum



Gambar 4. Laporan Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Kedalam Kurikulum